

BAB II

KERANGKA TEORI

A. Kajian Tentang Peran

1. Pengertian Peran

Peran adalah aspek dinamis dari kedudukan atau status. Seseorang yang telah melaksanakan hak dan kewajiban, berarti telah menjalankan suatu peran. Peran menurut pendapat Kozier Barbara adalah seperangkat tingkah laku yang diharapkan oleh orang lain terhadap seseorang sesuai dengan kedudukannya dalam suatu sistem.

- a. Peran menurut pendapat Soekanto adalah proses dinamis kedudukan (status).
- b. Peran menurut pendapat Merton adalah sebagai tingkah laku yang diharapkan masyarakat dari orang yang menduduki status tertentu.¹

¹ Dwi Iriani Margayaningsih, "Peran Masyarakat Dalam Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Di Desa", *Journal Edukasia Multikultural*, 7 (2021), 72–88.

Peran lebih menunjukkan pada fungsi penyesuaian diri, dan sebagai sebuah proses. Peran yang dimiliki oleh seseorang mencakup tiga hal anatara lain:

- a. Peran meliputi norma-norma yang dihubungkan dengan posisi seseorang didalam masyarakat.
- b. Peran adalah sesuatu yang dilakukan seseorang dalam Masyarakat.
- c. Peran juga merupakan perilaku seseorang yang penting bagi struktur social masyarakat.

Jadi dapat disimpulkan bahwa peran adalah aspek dinamis dari kedudukan seseorang terhadap harapan dari orang lain yang menduduki status tertentu.

2. Peran Menurut Para Ahli

Peran berkaitan dengan cara seseorang menjalankan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukan yang dimiliki dalam kehidupan bermasyarakat. Oleh sebab itu, pemahaman mengenai

peran tidak dapat dilepaskan dari pandangan para ahli yang mengemukakan pengertian peran berdasarkan kajian ilmiah masing-masing.

a. Pengertian Peran menurut Soerjono Soekanto 2002

Soerjono Soekanto menjelaskan bahwa peran merupakan aspek dinamis dari kedudukan (status) seseorang dalam masyarakat. Apabila seseorang menjalankan hak dan kewajibannya sesuai dengan status yang dimilikinya, maka ia sedang menjalankan peran. Peran menunjukkan fungsi nyata dari suatu kedudukan sosial. Dengan kata lain, peran menjadi bentuk aktual dari status dalam kehidupan sosial. Tanpa pelaksanaan peran, kedudukan sosial tidak memiliki arti yang konkret.²

b. Pengertian Peran menurut Ralph Linton (1936)

Ralph Linton mendefinisikan peran sebagai pola perilaku yang diharapkan dari seseorang yang

² Soerjono Soekanto. 2002. *Sosiologi: Suatu Pengantar*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.

menempati status tertentu dalam masyarakat. Peran berfungsi sebagai pedoman bertindak bagi individu dalam kehidupan sosial. Menurut Linton, peran membantu menciptakan keteraturan sosial karena setiap individu mengetahui kewajibannya. Peran juga bersifat normatif karena dipengaruhi oleh nilai dan norma sosial. Oleh sebab itu, peran tidak berdiri sendiri, melainkan terikat pada sistem sosial.

c. Pengertian Peran menurut Biddle dan Thomas (1966)

Biddle dan Thomas memandang peran sebagai seperangkat harapan yang dilekatkan pada individu dalam posisi sosial tertentu. Peran terbentuk melalui proses interaksi sosial. Mereka menekankan bahwa peran tidak hanya berasal dari individu, tetapi juga dari harapan masyarakat. Peran memengaruhi cara seseorang bertindak dan berhubungan dengan orang

lain. Dengan demikian, peran bersifat dinamis dan dapat berubah sesuai konteks sosial.³

Berdasarkan pendapat para ahli di atas, dapat disimpulkan bahwa peran merupakan bentuk pelaksanaan nyata dari kedudukan atau status seseorang dalam masyarakat. Peran berkaitan dengan serangkaian perilaku, hak, kewajiban, serta tanggung jawab yang diharapkan oleh lingkungan sosial terhadap individu. Peran tidak hanya dipengaruhi oleh individu itu sendiri, tetapi juga oleh nilai, norma, dan harapan sosial yang berlaku. Oleh karena itu, peran bersifat dinamis dan dapat berubah sesuai dengan konteks serta situasi sosial yang melingkupinya.

³ Jeroen J L Schepers, "A Meta-Analysis of Frontline Employees ,Role Behavior and the Moderating Effects of National Culture (Meta-Analisis Perilaku Peran Karyawan Garis Depan Dan Efek Moderasi Budaya Nasional)", *Journal of Service Research* 2020, Vol., 23.3 (2020), 255–80 <<https://doi.org/10.1177/1094670520918669>>.

3. Bentuk Bentuk Peran

a. Peran Aktif

Peran aktif adalah peran yang dijalankan seseorang secara nyata melalui keterlibatan langsung dalam berbagai aktivitas sosial sesuai dengan status yang dimilikinya. Peran ini tampak dalam bentuk tindakan, partisipasi, dan kontribusi yang dapat diamati secara langsung oleh masyarakat. Individu yang menjalankan peran aktif tidak hanya hadir secara fisik, tetapi juga berperan dalam pengambilan keputusan, pelaksanaan kegiatan, serta bertanggung jawab terhadap hasil dari peran tersebut.⁴

b. Peran Pasif

Peran pasif merupakan peran yang dijalankan tanpa keterlibatan langsung dalam aktivitas sosial, namun tetap memiliki pengaruh terhadap

⁴ Febri Fajar Pratama, "Peran Karang Taruna Dalam Mewujudkan Tanggung Jawab Sosial Pemuda Sebagai Gerakan Warga Negara", *Jurnal Civics: Media Kajian Kewarganegaraan*, 15.2 (2020), 173.

keberlangsungan sistem sosial. peran ini biasanya diwujudkan dalam bentuk sikap, dukungan moral, atau kepatuhan terhadap norma dan aturan yang berlaku. Meskipun tidak tampak secara fisik, peran pasif tetap penting karena membantu menjaga stabilitas sosial dan keberlanjutan nilai-nilai yang dianut oleh masyarakat.⁵

c. Peran Ideal

Peran Ideal adalah peran yang diharapkan oleh masyarakat terhadap individu berdasarkan norma, nilai, dan aturan sosial yang berlaku. Peran ini bersifat normatif, artinya menggambarkan bagaimana seseorang seharusnya bertindak sesuai dengan kedudukannya. Dalam praktiknya, peran ideal sering kali menjadi standar atau tolok ukur

⁵ Desi Karlina, "Peran Guru Pendidikan Agama Islam Dalam Pembinaan Sikap Spiritual Dan Sosial Di Sekolah Menengah Pertama", *Tadabbur: Jurnal Peradaban Islam*, 3.2 (2021), 358–75.

penilaian masyarakat, meskipun tidak selalu dapat diwujudkan secara sempurna oleh individu.⁶

d. Peran Aktual (Peran Nyata)

Peran Aktual adalah peran yang benar-benar dijalankan oleh individu dalam kehidupan sehari-hari. Peran aktual dapat berbeda dengan peran ideal karena dipengaruhi oleh kondisi sosial, kemampuan individu, serta situasi yang dihadapi. Perbedaan antara peran ideal dan peran aktual sering kali menjadi sumber evaluasi sosial terhadap individu atau kelompok dalam masyarakat.

e. Peran Utama

Peran utama adalah peran pokok yang melekat pada status sosial utama seseorang. Peran ini menjadi tanggung jawab utama individu dan memiliki pengaruh besar terhadap identitas sosialnya. Pelaksanaan peran utama biasanya

⁶ Sulaiman Mustafa Wuhdin, "Peran Lembaga Adat Dalam Menerapkan Nilai-Nilai Adat Di Masyarakat Adat Lamakera: Studi Kasus Orang Tua Adat Suku Pito Di Lamakera", *Religion Education Social Laa Roiba Journal*, 7 (2025), 650–60 <<https://doi.org/10.47476/reslaj.v7i1.5848>>.

menuntut komitmen tinggi karena berkaitan langsung dengan fungsi sosial yang diharapkan oleh masyarakat.⁷

f. Peran Tambahan (Peran Ganda)

Peran tambahan merupakan peran lain yang dijalankan seseorang di luar peran utamanya. Kondisi ini disebut sebagai *role set*, yaitu sekumpulan peran yang muncul dari satu status sosial. Peran tambahan menunjukkan bahwa individu dalam masyarakat sering kali menjalankan lebih dari satu peran secara bersamaan, sehingga membutuhkan kemampuan penyesuaian dan pengelolaan peran agar tidak menimbulkan konflik peran.⁸

⁷ Ardhian Nurhadi and Daniar Adriyanti, "Status Sosial Unsur Penokohan Pada Cerita Pendek " Sang Guru Juki " Karya Ahmad Tohari", *Indonesian Language Education and Literature*, 6.1 (2020), 119–27 <<https://doi.org/10.24235/ileal.v6i1.3816>>.

⁸ Rikza Fitrotul Umaroh and Ayu Dyah Hapsari, "Burnout Sebagai Variabel Moderator Konflik Peran Ganda Dengan Kepuasan Pernikahan Pada Perempuan Yang Bekerja", *Jurnal Flourishign*, 2.4 (2022), 315–31 <<https://doi.org/10.17977/10.17977/>>.

B. Pengertian dan peran Remaja Islam Masjid (RISMA)

Dalam Mencegah Pemurtadan

1. Pengertian Remaja Islam Masjid (Risma)

Remaja masjid adalah sebuah organisasi remaja, khususnya remaja yang beragama Islam. Organisasi ini tumbuh dan berkembang atas inisiatif dari para remaja dilingkungan Masjid yang ada disetiap ekolah. Remaja masjid pada umumnya memiliki banyak peranan yang diperankan oleh remaja-remaja yang peduli dan aktif terhadap situasi dan kondisi masyarakat dilingkungannya khususnya tentang masalah keagamaan, sebagai sarana untuk mempererat tali silaturahmi baik dalam pergaulan sesama remaja dan juga pergaulan pada masyarakat.⁹ Remaja masjid bertugas menginisiasi dan mengelola berbagai kegiatan seperti kajian agama, pengajian, kegiatan sosial, dan acara-acara keagamaan lainnya yang

⁹ Dwi Wulandari, Muhammad Fahmi, and Fathur Rohman, "Peran Remaja Masjid Dalam Meningkatkan Partisipasi Keagamaan Peserta Didik Di SMP Negeri 19 Surabaya", *Hikmah : Jurnal Studi Pendidikan Agama Islam*, 1.4 (2024), 164–81 <<https://doi.org/10.61132/hikmah.v1i4.307>>.

bertujuan untuk membina spiritualitas, moral, dan karakter generasi muda.

Risma adalah organisasi yang menghimpun remaja muslim dan mempunyai keterikatan dengan masjid, bersifat dinamis dan progresif. Juga merupakan suatu organisasi yang di pelopori serta beranggotakan anak-anak yang berusia remaja serta organisasi yang kegiatannya diarahkan dalam rangka bimbingan remaja-remaja menuju kedewasaan dan mencapai taqwa kepada Allah SWT dan bertujuan waktu melestarikan dan menyiarkan Islam dikalangan pemuda dan pemudi khususnya dan masyarakat pada umum nya. Remaja Masjid pada umumnya memiliki banyak peranan yang diperankan oleh remaja-remaja yang peduli dan aktif terhadap situasi dan kondisi masyarakat dilingkungannya khususnya tentang masalah keagamaan.

2. Peran Remaja Islam Masjid (Risma) Dalam Mencegah Pemurtadan

Fenomena pemurtadan di kalangan remaja tidak dapat dilepaskan dari lemahnya pemahaman agama, pengaruh lingkungan pergaulan, serta minimnya pembinaan keIslaman yang berkelanjutan. Dalam kondisi seperti ini, keberadaan Remaja Islam Masjid (Risma) memiliki posisi yang sangat penting sebagai wadah pembinaan sekaligus penguatan identitas keIslaman generasi muda.¹⁰

Risma berperan sebagai ruang pembelajaran nonformal bagi remaja untuk memperdalam pemahaman akidah dan ajaran Islam. Melalui kegiatan pengajian rutin, halaqah, diskusi keIslaman, dan mentoring, remaja tidak hanya memperoleh pengetahuan agama, tetapi juga diarahkan untuk menanamkan keyakinan yang kokoh terhadap nilai-nilai Islam. Pemahaman akidah yang baik

¹⁰ Apriana Pambudi, 'Peran Risma Terhadap Akhlak Remaja Di Desa Sumberrejo Kecamatan Batanghari Lampung Timur 2020', *Skripsi, Institut Agama Islam Negeri (Iain) Metro*, 1.373 (2020), 33.

menjadi fondasi utama agar remaja tidak mudah terpengaruh oleh ajaran yang menyimpang maupun bujukan yang mengarah pada pemurtadan.¹¹

Selain itu, Risma juga membentuk lingkungan pergaulan yang positif dan religius. Interaksi yang terjalin antaranggota menciptakan suasana kebersamaan yang sarat dengan nilai-nilai Islami. Lingkungan seperti ini membantu remaja merasa memiliki tempat untuk tumbuh dan berkembang, sehingga mereka tidak mencari pengakuan di luar komunitas yang berpotensi melemahkan iman.

Peran lain yang tidak kalah penting adalah peningkatan literasi keIslaman. Melalui kajian tematik dan diskusi tentang isu-isu keagamaan kontemporer, remaja diajak untuk berpikir kritis serta memahami berbagai tantangan yang dihadapi umat Islam saat ini. Bekal pengetahuan ini membuat mereka lebih waspada

¹¹ Abdul Azis Khunaifi Baharudin, Ida Fiteriani, Rezi Kriani, "Penguatan Benteng Spiritual Pekon Marga Mulya : Pendampigan Anggota Remaja Islam Masjid (Risma) Sebagai Pengajar TPA Dimasa Pandemi Covid-19", *Journal Pengabdian Masyarakat Pendidikan Dasar*, 1.2 (2021), 54–65.

dan tidak mudah terpengaruh oleh ajaran atau aktivitas yang dapat mengikis keyakinan.

C. Pengertian Dan Peran Ponpes Dalam Mencegah pemurtadan

1. Pengertian Pondok Pesantren

Pondok pesantren merupakan suatu sistem pendidikan yang selalu menjadi pusat perhatian masyarakat. Hal itu disebabkan oleh pendekatan pembelajaran yang tengah berlangsung, dan juga dalam nilai-nilai kehidupan yang diterima, diantaranya seperti cara hidup sederhana, struktur pendidikan dan semua aspek masyarakat lainnya.¹² Oleh karena itu, tidak ada definisi yang tepat tentang perwakilan dari beberapa pesantren yang ada, karena dari beberapapesantren yang ada di Indonesia memiliki kekhasan tersendiri dalam system pendidikan. Namun, ada kesamaan di pesantren.

¹² Abd. Mahfud, Benny Prasetya, and Subhan Adi Santoso, "Peran Pondok Pesantren Dalam Pembentukan Karakter Religius Anak Di Desa Mranggonlawang", *Jurnal Pendidikan Islam*, 8.2 (2022), 19–28 <<https://doi.org/10.37286/ojs.v8i2.155>>.

Persamaan ini sering kita dengar dalam istilah khusus untuk pesantren.¹³

Pendidikan Pondok Pesantren saat ini mendapat dukungan publik yang luas karena pendididkn pesantren diharapkan akan memainkan peran penting dalam meredam tren kemerosotan moral di masyarakat. Pesantren sebagai lembaga pendidikan yang didedikasikan untuk menumbuhkan dan menanamkan nilai-nilai moral dengan dasar agama yang kuat pada siswa, memiliki kesempatan bagus untuk menjadi lembaga panutan dalam hal penguatan Aqidah di Indonesia.¹⁴

Pada umumnya pondok pesantren mempunyai ciri khas yang dikenal dengan lembaga pendidikan mandiri.

Pesantren juga tidak tergantung sepenuhnya terhadap

¹³ Abdul Hadi, "Pondok Pesantren Merupakan Sebuah Sistem Dalam Pendidikan Islam Identik Dengan Pendidikan Bagi Generasi Berlabelkan Pondok Pesantren Modern . Minat Berbagai Lapisan Masyarakat Yang Semakin Banyak Dan Otomatis Pondok Peranannya Dalam Mengembangkan Pendidik", *AL-HIKMAH: Jurnal Pendidikan Dan Pendidikan Agama Islam*, 4.2 (2022), 130–37.

¹⁴ Putri Elfa Nur Izza and M. Fajar Al Azizi, "Pesantren Sebagai Wadah *Building Character* Santri (Studi Komparasi Karakter Siswa Yang Tinggal Dipesantren Dan Tidak Di Pesantren)", *JDMP (Jurnal Dinamika Manajemen Pendidikan)*, 6.2 (2022), 116–23.

pemerintah, karena pendidikan pesantren satu-satunya lembaga pendidikan Islam yang mandiri. Dan Pendidikan pesantren tidak gampang dipengaruhi oleh ajaran di luar Islam. Pendidikan pesantren berfungsi sebagai lembaga pendidikan yang membentuk akhlaq seorang santri menjadi lebih baik. Pendidikan pesantren sering dikenal dengan sebutan pondok pesantren dengan cirri-ciri sebagai berikut;

- a. Pondok pesantren adalah sebuah tempat yang didalamnya terdapat lembaga pendidikan Islam biasanya ditempati oleh anak santri.
- b. Masjid ialah sebuah tempat ibadahnya orang yang beragama Islam, dimana seorang santri secara khusus diajarkan amalan seperti shalat, bacaan klasik, dan kaderisasi.
- c. Pendidikan kitab kuning adalah proses pembelajaran kitab-kitab klasik yang tujuan utamanya adalah membentuk karakter anak.

- d. Anak santri adalah sebutan dari anak yang sedang belajar di pondok pesantren.
- e. Kyai merupakan pengasuh pondok pesantren, dan sering kali kata kyai menjadi sebutan masyarakat kepada para ulama yang menjadi pemimpin santri yang mengajarkan kitab klasik.

2. Pengertian Santri

Santri adalah mereka yang dengan taat melaksanakan perintah agamanya, yaitu Islam. Sedangkan asal usul perkataan santri setidaknya ada dua pendapat yang dapat bisa dijadikan rujukan. Pertama, dari kata “Santri” dari bahasa sansekerta yang artinya melek huruf. Kedua, kata santri yang berasal dari bahasa jawa “*Cantrik*” yang berarti seseorang yang mengikuti seorang ustad kemanapun pergi atau menetap dengan tujuan dapat belajar suatu keilmuan kepadanya. Pengertian ini senada dengan pengertian santri secara umum, yakni orang yang belajar agama Islam disebuah pesantren yang menjadi tempat belajar bagi santri. Jika

dirunut dengan adat pesantren, terdapat dua kelompok santri, yakni: Santri kalong adalah peserta didik yang berada disekitar pesantren yang ingin menumpang belajar dipesantren pada waktu-waktu tertentu tanpa tinggal atau menginap di asrama pesantren. santri mukim yakni murid-murid yang berasal dari daerah jauh dan menetap dipesantren biasanya menjadi kelompok tersendiri dan sudah memikul tanggung jawab mengurus kepentingan pesantren sehari-hari, seperti halnya mengajar santrisantri muda tentang kitab-kitab tingkatan rendah dan menengah.¹⁵

Santri adalah sebutan orang-orang atau anak-anak yang sedang belajar menuntut ilmu di setiap pondok pesantren. Santri tersebut datang dari daerah yang jauh namun ada juga yang tidak jauh rumahnya dari pondok pesantren. Dan santri tersebut ada yang bermuqim dipondok pesantren dan ada juga santri yang tidak

¹⁵ Meldi Tika Amanda, "Pembelajaran Tahsin Al-Qur'an Berbasis Metode Tilawati Pada Santri Di Tpq Ar-Rofi' Tulang Bawang Barat", *Skripsi, Metrouniversitas Islam Negeri Raden Intan Lampung*, 1 (2025), 36.

bermuqim di pondok pesantren tetapi hanya datang saat belajar saja tetapi setelah selesai belajar langsung pulang kerumahnya masing-masing hal itu dikarenakan rumah santri tersebut dengan pondok pesantren tidak jauh.¹⁶

3. Peran Pondok Pesantren Dan Santri Dalam Mencegah Pemurtadan

Pondok pesantren memiliki peran yang sangat penting dalam menjaga dan memperkuat akidah umat Islam, khususnya di tengah masyarakat yang rentan terhadap pengaruh pemurtadan. Keberadaan pesantren tidak hanya berfungsi sebagai lembaga pendidikan formal, tetapi juga sebagai pusat pembinaan keagamaan dan sosial bagi masyarakat sekitar. Melalui berbagai kegiatan keIslaman yang rutin dilaksanakan, pesantren berupaya menanamkan pemahaman agama yang benar dan mendalam sehingga masyarakat tidak mudah terpengaruh oleh ajakan pindah agama yang sering

¹⁶ Wiwin Fitriyah, Abd Hamid Wahid, and Chusnul Muali, "Eksistensi Pesantren Dalam Pembentukan Kepribadian Santri", *Jurnal Studi Keislaman Dan Ilmu Pendidikan*, 6.November (2022), 155–73.

disamarkan dalam bentuk bantuan sosial atau pendekatan kemanusiaan.¹⁷

Selain itu, sistem pendidikan pesantren yang berlangsung secara intensif dan berkelanjutan mampu membentuk karakter santri yang kuat secara spiritual. Santri dibiasakan untuk mempelajari ilmu-ilmu keIslaman, mengamalkan ibadah secara konsisten, serta menjalani kehidupan yang berlandaskan nilai-nilai Islam. Pembiasaan ini secara tidak langsung membentuk ketahanan iman santri, sehingga mereka memiliki keyakinan yang kokoh dan tidak mudah goyah ketika menghadapi berbagai pengaruh dari luar.

Santri juga berperan sebagai agen dakwah di tengah masyarakat. Melalui kegiatan ceramah, pengajian, dan pengabdian sosial, santri menyampaikan ajaran Islam dengan pendekatan yang santun dan persuasif. Kehadiran santri di tengah masyarakat

¹⁷ Novi Adriani, "Al-Hikmah Peran Pondok Pesantren Modern Baitussalam Dalam Memperkuat Nilai Aqidah Islam Masyarakat Desa Naga Jaya 1 Kec . Bandar Huluan", *Jurnal Theosofi Dan Peradaban Islam*, 4 (2022), 39–53.

memberikan ruang dialog keagamaan yang sehat, sekaligus menjadi upaya pencegahan agar masyarakat tidak mengalami kekosongan spiritual yang dapat dimanfaatkan oleh pihak-pihak tertentu untuk melakukan pemurtadan.¹⁸

Dengan demikian, peran pondok pesantren dan santri dalam mencegah pemurtadan tidak hanya dilakukan melalui pendekatan doktrinal, tetapi juga melalui pembinaan sosial, pendidikan, dan dakwah yang berkesinambungan. Sinergi antara pesantren, santri, dan masyarakat menjadi kunci utama dalam menjaga keteguhan akidah umat Islam secara kolektif.

D. Kajian tentang kolaborasi

1. Pengertian kolaborasi

Kolaborasi adalah istilah umum yang digunakan untuk menggambarkan sebuah pola hubungan kerja sama yang dilakukan lebih dari satu pihak. Definisi

¹⁸ Sunardi, "Manajemen Promosi Pesantren Berbasis Santri", *At Tadbir: Islamic Education Management Journal*, 3.1 (2025), 75–89.

kolaborasi sering dijelaskan oleh beragam para ahli berdasarkan sudut pandang yang berbeda. Definisi tersebut berdasarkan prinsip yang sama yaitu tentang kebersamaan, kerja sama, berbagi tugas, kesamaan, dan juga tanggung jawab, secara umum kolaborasi adalah hubungan antar organisasi yang saling ikut serta dan saling menyepakati untuk mencapai bersama mencapai tujuan, berbagi informasi, berbagi sumberdaya, berbagi manfaat, dan juga bertanggung jawab dalam mengambil keputusan bersama untuk menyelesaikan beragam permasalahan Kolaborasi merupakan salah satu bentuk interaksi sosial.

Kolaborasi juga dapat di artikan suatu bentuk proses sosial, dimana didalamnya terdapat aktivitas tertentu yang ditujukan untuk mencapai tujuan bersama dengan saling membantu dan saling memahami aktivitas masing-masing. Sebagaimana dikutip oleh Abdulsyani, Roucek dan Warren, mengatakan bahwa kolaborasi berarti bekerja bersama-sama untuk mencapai tujuan

bersama. Ia adalah suatu proses sosial yang paling dasar.¹⁹

Biasanya, kolaborasi melibatkan pembagian tugas, dimana setiap orang mengerjakan setiap pekerjaan yang merupakan tanggung jawabnya demi tercapainya tujuan bersama. Sedangkan dalam istilah administrasi, pengertian kolaborasi sebagaimana yang dijelaskan oleh Hadari Nawawi adalah usaha untuk mencapai tujuan bersama yang telah ditetapkan melalui pembagian tugas/pekerjaan, tidak sebagai pengkotakan kerja akan tetapi sebagai satu kesatuan kerja, yang semuanya terarah pada pencapaian tujuan.²⁰

Menurut Abdulsyani, Kolaborasi adalah suatu bentuk proses sosial, dimana didalamnya terdapat aktivitas tertentu yang ditujukan untuk mencapai tujuan bersama dengan saling membantu dan saling memahami

¹⁹ Maria Ulfa Batoebara, "Inovasi Dan Kolaborasi Dalam Era Komunikasi Digital", *Jurnal Prosiding*, 2021, 21–29.

²⁰ Wiri Wirastuti and others, "Adaptasi Dan Kolaborasi Menuju Koperasi Inovatif Kota Palu Adaptation and Collaboration Towards Innovative Cooperatives in Palu City", *Jurnal Abdimas (Journal of Community Service): Sasambo*, 4.4 (2022), 698–707.

aktivitas masing-masing²¹, Ada beberapa pengertian kolaborasi menurut para ahli contoh sebagai berikut:

a. menurut Chris Huxham (1996)

Chris Huxham memandang kolaborasi sebagai proses kerja bersama yang melibatkan berbagai pihak yang saling bergantung satu sama lain. Kolaborasi muncul karena tidak ada satu aktor pun yang mampu menyelesaikan persoalan secara mandiri. Dalam pandangannya, kolaborasi menuntut adanya interaksi yang intens, negosiasi kepentingan, serta pembagian peran yang jelas. Huxham menegaskan bahwa kolaborasi sering kali bersifat kompleks karena perbedaan tujuan dan kepentingan antar pihak. Oleh karena itu, keberhasilan kolaborasi sangat ditentukan oleh kemampuan para aktor dalam

²¹ Wan Ali Akbar Wan Abdullah And Mohd Isa Hamzah, "Kolaborasi Dalam Penghasilan Inovasi Pengajaran", *MANU (Jurnal Pusat Penataan Ilmu Dan Bahasa Universiti Malaysia Sabah)*, 32.2 (2021), 1–17.

mengelola hubungan dan membangun kepercayaan bersama.²²

b. Menurut Hardy & Phillips (1998)

menjelaskan kolaborasi sebagai strategi keterlibatan antar lembaga yang didasarkan pada partisipasi sukarela semua pihak, sehingga setiap organisasi memilih untuk terlibat bukan karena paksaan, melainkan karena ada kepentingan bersama yang ingin dikelola melalui proses interaksi yang terus-menerus. Dalam pandangan ini, kolaborasi menekankan hubungan yang dibangun lewat komunikasi, negosiasi, dan penyesuaian antaraktor, sehingga kerja sama tidak hanya dipahami sebagai tindakan bersama, tetapi juga sebagai proses membangun keterlibatan, komitmen,

²² Rob Van Tulder and Nienke Keen, "Capturing Collaborative Challenges : Designing Complexity - Sensitive Theories of Change for Cross - Sector Partnerships", *Journal of Business Ethics*, 150.2 (2022), 315–32 <<https://doi.org/10.1007/s10551-018-3857-7>>.

dan saling pengertian dalam menghadapi tujuan atau masalah yang sama.²³

c. Menurut Hardy, Lawrence, dan Grant (2005),

kolaborasi dipahami sebagai hasil dari rangkaian percakapan yang terus-menerus di antara para pihak yang terlibat, sehingga kolaborasi tidak hanya berarti bekerja bersama secara teknis, tetapi juga membangun makna, kesepahaman, dan identitas kolektif melalui proses komunikasi yang berkelanjutan. Dalam pandangan ini, percakapan menjadi dasar terbentuknya kolaborasi karena melalui dialog para aktor dapat menegosiasikan tujuan, membangun komitmen, dan menciptakan hubungan kerja sama yang lebih mendalam.²⁴

²³ Hardy & Phillips N. (1998). *Strategies of engagement: Lessons from the critical examination of collaboration and conflict in an interorganizational domain*. *Journal Of Organization Science*, 9(2), 217–230

²⁴ Hardy, Lawrence & Grant D. (2005). *Discourse and collaboration: The role of conversations and collective identity*. *Journal Academy of Management Review*, 30(1), 58–77.

d. Menurut Barbara Gray (1989)

Barbara Gray mendefinisikan kolaborasi sebagai proses interaksi antara pihak-pihak yang otonom untuk mencapai tujuan bersama. Kolaborasi menurutnya bukan sekadar kerja sama teknis, melainkan proses sosial yang membutuhkan komitmen kolektif. Gray menekankan pentingnya dialog sebagai sarana untuk membangun pemahaman dan kesepakatan bersama. Dalam kolaborasi, setiap pihak dituntut untuk bersedia berbagi sumber daya dan tanggung jawab. Kolaborasi dianggap efektif apabila seluruh aktor terlibat secara aktif dalam proses pengambilan Keputusan.²⁵

e. Menurut Ansell dan Gash (2008)

Ansell dan Gash memandang kolaborasi sebagai proses pengambilan keputusan bersama

²⁵ Barry Robert Pittendrigh, "A Positive Project Outcome: Lessons From A Non-Dominant Government University-Based Program", *IJPS Interdisciplinary Journal Of Partnership Studies*, 7.2 (2020), 1–28.

yang melibatkan berbagai aktor secara setara. Kolaborasi dibangun melalui dialog yang berkelanjutan dan partisipasi langsung dari para pihak yang terlibat. Menurut mereka, kolaborasi membutuhkan komitmen jangka panjang dan rasa saling percaya antar aktor. Proses kolaboratif tidak dapat berjalan secara instan, melainkan melalui tahapan interaksi yang terus berkembang. Keberhasilan kolaborasi ditandai dengan tercapainya kesepakatan dan tujuan bersama yang disepakati secara kolektif.²⁶

f. Menurut Rosabeth Moss Kanter (1994)

Rosabeth Moss Kanter memandang kolaborasi sebagai hubungan strategis yang dibangun untuk mencapai tujuan bersama. Ia menekankan bahwa kolaborasi membutuhkan visi dan tujuan yang disepakati oleh seluruh pihak. Menurut Kanter, kolaborasi yang kuat bertumpu pada kualitas

²⁶ Nuryana Lestari, "Collaborative Process Pada Program Gandeng Gendong Kota Yogyakarta", *Skripsi, Universitas Gadjah Mada(UGM)*, 1.5 (2024), 16.

hubungan antar aktor, bukan semata-mata pada aturan formal. Kepercayaan dan komitmen jangka panjang menjadi elemen penting dalam menjaga keberlangsungan kolaborasi. Tanpa adanya hubungan yang solid, kolaborasi cenderung bersifat sementara dan mudah mengalami kegagalan.

g. Menurut Wood dan Gray (1991)

Wood dan Gray mendefinisikan kolaborasi sebagai proses interaksi antara aktor yang memiliki kepentingan berbeda namun bekerja untuk mencapai hasil bersama. Kolaborasi muncul dalam situasi yang kompleks dan penuh tantangan. Mereka menekankan bahwa kolaborasi memerlukan keterbukaan dan fleksibilitas dalam struktur kerja.

Proses kolaboratif juga memungkinkan terjadinya pembelajaran bersama antar aktor. Kolaborasi

dinilai berhasil apabila seluruh pihak memperoleh manfaat yang seimbang dari proses tersebut.²⁷

Kesimpulan dari seluruh pendapat para ahli tersebut dapat disimpulkan bahwa kolaborasi adalah proses kerja bersama antara dua pihak atau lebih yang memiliki perbedaan kepentingan, peran, dan sumber daya, namun terikat oleh tujuan bersama yang ingin dicapai. Kolaborasi terjadi karena setiap pihak menyadari keterbatasannya dan membutuhkan pihak lain untuk menyelesaikan persoalan yang tidak bisa diselesaikan sendiri. Proses kolaborasi menuntut adanya komunikasi terbuka, dialog yang berkelanjutan, serta kesediaan untuk berbagi tanggung jawab dan keputusan. Kepercayaan dan komitmen menjadi pondasi utama agar kolaborasi dapat berjalan secara efektif dan berkelanjutan. Kolaborasi bukan sekadar bekerja bersama secara

²⁷ Barbara Gray dan Donna J. Wood, "Toward a Comprehensive Theory of Collaboration," *Journal of Applied Behavioral Science* 27, no. 2 (2022): 139–162.

formal, tetapi merupakan hubungan aktif yang dibangun melalui interaksi dan kesepahaman bersama. Dengan demikian, kolaborasi dapat dipahami sebagai upaya bersama yang terencana dan sadar untuk mencapai hasil yang saling menguntungkan.

2. Jenis-Jenis Kolaborasi

Kolaborasi merupakan proses kerja sama yang melibatkan dua pihak atau lebih yang memiliki tujuan bersama, di mana setiap pihak saling berkontribusi sesuai dengan peran dan kapasitasnya.²⁸ Dalam kajian ilmiah, kolaborasi memiliki beberapa bentuk yang dapat diklasifikasikan sebagai berikut

a. Kolaborasi Formal

Kolaborasi formal adalah bentuk kerja sama yang dilakukan secara terstruktur dan dilembagakan melalui aturan, kesepakatan tertulis, atau organisasi

²⁸ Xavier Castañer, "Collaboration , Coordination , and Cooperation Among Organizations : Establishing the Distinctive Meanings of These Terms Through a Systematic Literature Review", *Journal of Management*, 46.6 (2020), 965–1001 <<https://doi.org/10.1177/0149206320901565>>.

resmi. Kolaborasi ini biasanya memiliki pembagian tugas yang jelas, mekanisme kerja yang terencana, serta tujuan yang telah disepakati bersama.

Menurut Sugiyono (2017), kolaborasi formal ditandai dengan adanya sistem kerja yang jelas dan terorganisasi, sehingga setiap pihak memahami peran dan tanggung jawabnya dalam mencapai tujuan bersama. Bentuk kolaborasi ini sering dijumpai dalam kerja sama antar lembaga, organisasi keagamaan, maupun institusi sosial.²⁹

b. Kolaborasi Informal

Kolaborasi informal merupakan kerja sama yang terbentuk secara alami tanpa ikatan struktural yang ketat. Bentuk kolaborasi ini muncul dari kesadaran, kedekatan sosial, serta kepentingan bersama antar individu atau kelompok.

²⁹ Anggi Rachma, Zakia Fitri, and Heru Sugiyono, "Strategi Penanganan Pekerja Migran Indonesia Yang Bekerja Tidak Sesuai Dengan Kontrak Kerja", *Indonesia Jurnal of Criminal Law*, 6.3 (2023), 2–9.

Menurut Wood dan Gray (1991), kolaborasi informal terjadi ketika pihak-pihak yang terlibat saling berinteraksi secara fleksibel untuk menyelesaikan masalah bersama tanpa harus terikat oleh aturan formal. Kolaborasi ini banyak terjadi dalam kehidupan masyarakat, seperti kerja sama antar tokoh agama atau warga dalam menjaga kerukunan sosial.³⁰

Dalam konteks remaja masjid dan pondok pesantren, kolaborasi informal sering menjadi pendukung utama keberhasilan kegiatan formal. Misalnya, kegiatan pencegahan perilaku negatif atau pembinaan aqidah remaja dapat berjalan efektif ketika anggota secara sukarela saling berkoordinasi, berbagi informasi, dan membantu dalam pelaksanaan kegiatan tanpa menunggu arahan resmi dari pengurus atau pihak pesantren. Bentuk

³⁰ Donna Wood, "Toward a Comprehensive Theory of Collaboration", *The Journal of Applied Behavioral Science*, 27 (2021), 139–62 <<https://doi.org/10.1177/0021886391272001>>.

kolaborasi informal ini tampak nyata dalam kegiatan seperti yasinan bersama, peringatan maulid, isra' mi'raj, pertunjukan hadroh, dan kegiatan gotong royong. Kegiatan-kegiatan tersebut menunjukkan bagaimana kolaborasi informal tidak hanya memperkuat hubungan sosial, tetapi juga menjadi strategi penting dalam meningkatkan partisipasi aktif dan tanggung jawab bersama dalam mencapai tujuan kelompok.

c. Kolaborasi Partisipatif

Kolaborasi partisipatif menekankan keterlibatan aktif seluruh pihak yang bekerja sama. Setiap pihak tidak hanya menjadi pelaksana, tetapi juga ikut terlibat dalam proses perencanaan, pelaksanaan, hingga evaluasi kegiatan.

Menurut Ansell dan Gash (2008), kolaborasi partisipatif memungkinkan terciptanya kepercayaan dan komitmen bersama karena semua pihak memiliki ruang untuk menyampaikan pendapat dan

berkontribusi dalam pengambilan keputusan. Bentuk kolaborasi ini efektif dalam membangun kerja sama yang berkelanjutan di tengah masyarakat.³¹

d. Kolaborasi Fungsional

Kolaborasi fungsional merupakan kerja sama yang didasarkan pada fungsi dan keahlian masing-masing pihak. Setiap pihak berkontribusi sesuai dengan kemampuan dan perannya agar tujuan bersama dapat tercapai secara efektif.

Menurut Thomson dan Perry (2006), kolaborasi fungsional menekankan pada sinergi peran, di mana setiap aktor menjalankan fungsi spesifik namun tetap saling melengkapi. Bentuk ini sering digunakan dalam kerja sama lintas sektor, termasuk bidang sosial dan keagamaan.³²

³¹ Mia Fairuza, "Kolaborasi Antar Stakeholder Dalam Pembangunan Inklusif Pada Sektor Pariwisata (Studi Kasus Wisata Pulau Merah Di Kabupaten Banyuwangi)", *Skripsi, Universitas Airlangga*, 5 (2020), 1–13.

³² Yusran Amir, "Collaborative Governance Implementasi Program Makassar Recover Penanggulangan Covid-19 Di Kota Makassar", *Universitas Hasanuddin Makassar*, 2023, 29–40.

e. Kolaborasi Sosial

Kolaborasi sosial adalah bentuk kerja sama yang berorientasi pada kepentingan sosial dan kesejahteraan masyarakat. Kolaborasi ini bertujuan untuk menciptakan keharmonisan, solidaritas, serta penyelesaian masalah sosial secara bersama-sama.

kolaborasi sosial terjadi ketika berbagai pihak dengan latar belakang berbeda bekerja sama untuk mengatasi permasalahan yang tidak dapat diselesaikan secara individu. Kolaborasi ini relevan dalam konteks masyarakat multikultural dan kehidupan antar umat beragama.³³

3. Faktor-Faktor Keberhasilan Kolaborasi

Keberhasilan sebuah kolaborasi tidak terjadi secara otomatis, melainkan ditentukan oleh sejumlah

³³ Rahmawati Ahfan And Others, "Kolaborasi Antar Aktor Dalam Inovasi Desa Sebagai Salah Satu Model Pengembangan Masyarakat Islam (Studi Komparasi Desa Hanura Kecamatan Teluk Pandan Kabupaten Pesawaran Dan Desa Tarahan Kecamatan Katibung Di Kabupaten Lampung Selatan)", *Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung Bandar Lampung*, 2022, 22–30.

faktor kunci yang saling mendukung satu sama lain. Para ahli telah mengidentifikasi berbagai elemen yang menjadi prasyarat agar proses kolaborasi dapat berjalan secara efektif dan menghasilkan output yang optimal. Faktor-faktor tersebut tidak bersifat tunggal, melainkan merupakan satu kesatuan sistem yang saling berkaitan dan memengaruhi kualitas hubungan kerja sama antar pihak yang terlibat.

a. Kepercayaan (Trust)

Kepercayaan merupakan fondasi utama dalam setiap bentuk kolaborasi. Tanpa adanya rasa saling percaya antar pihak yang terlibat, proses kerja sama akan sangat rentan mengalami hambatan, konflik kepentingan, bahkan kegagalan. Menurut Ansell dan Gash (2008), kepercayaan dibangun secara bertahap melalui proses interaksi yang berulang dan konsisten. Ia tidak dapat terbentuk secara instan, melainkan lahir dari pengalaman bersama, keterbukaan informasi, dan

konsistensi dalam menepati komitmen yang telah disepakati bersama.³⁴

Senada dengan hal tersebut, Thomson dan Perry (2006) menyatakan bahwa kepercayaan dalam kolaborasi terbagi menjadi dua dimensi, yakni kepercayaan berbasis kompetensi (competence-based trust) dan kepercayaan berbasis nilai (value-based trust). Kepercayaan berbasis kompetensi merujuk pada keyakinan bahwa pihak lain mampu menjalankan perannya secara profesional, sedangkan kepercayaan berbasis nilai berkaitan dengan keyakinan bahwa pihak lain memiliki integritas dan niat yang baik dalam proses kerja sama. Kedua dimensi ini sama-

³⁴ Chris Ansell dan Alison Gash, "Collaborative Governance in Theory and Practice," *Journal of Public Administration Research and Theory* 18, no. 4 (2008): 543–571.

sama penting untuk membangun fondasi kolaborasi yang kokoh dan berkelanjutan.³⁵

Dalam konteks kolaborasi antara remaja masjid dan santri pondok pesantren, kepercayaan menjadi elemen yang sangat krusial. Kepercayaan antara kedua pihak tidak hanya dibangun atas dasar kesamaan lembaga, tetapi juga atas dasar kesamaan nilai, visi dakwah, serta komitmen bersama dalam menjaga akidah masyarakat. Semakin tinggi tingkat kepercayaan yang terjalin, semakin terbuka ruang kerja sama yang produktif dan bermakna bagi kedua belah pihak.

b. Komunikasi dan Dialog Terbuka

Faktor kedua yang sangat menentukan keberhasilan kolaborasi adalah kualitas komunikasi yang terjalin antar pihak. Menurut

³⁵ Ann Marie Thomson dan James L. Perry, "Collaboration Processes: Inside the Black Box," *Public Administration Review* 66, no. S1 (2006): 20–32.

Hardy, Lawrence, dan Grant (2005), kolaborasi pada dasarnya dibangun melalui serangkaian percakapan yang berkelanjutan. Dialog yang terbuka dan jujur memungkinkan setiap pihak untuk menegosiasikan kepentingan, menyampaikan kekhawatiran, serta menyepakati langkah-langkah strategis secara bersama. Tanpa komunikasi yang efektif, kesalahpahaman mudah terjadi dan dapat menghambat laju kerja sama.³⁶

Lebih lanjut, Bryson, Crosby, dan Stone (2006) menambahkan bahwa komunikasi dalam kolaborasi tidak hanya bersifat fungsional atau instrumental, tetapi juga bersifat relasional. Artinya, komunikasi yang baik tidak hanya bertujuan untuk menyampaikan informasi teknis, tetapi juga untuk mempererat hubungan emosional

³⁶ Cynthia Hardy, Thomas B. Lawrence, dan David Grant, "Discourse and Collaboration: The Role of Conversations and Collective Identity," *Academy of Management Review* 30, no. 1 (2005):21-25

³⁶ John M. Bryson, Barbara C. Crosby, dan Melissa Middleton Stone, "The Design and Implementation of Cross-Sector Collaborations: Propositions from the Literature," *Public Administration Review* 66, no. S1 (2006): 44-55.

dan membangun rasa kebersamaan di antara para aktor yang terlibat. Komunikasi relasional ini sangat penting dalam konteks kolaborasi yang melibatkan kelompok sosial-keagamaan, karena nilai-nilai afektif seperti persaudaraan, empati, dan kepedulian memiliki peran yang tidak kalah penting dibandingkan aspek teknis pelaksanaan program.³⁷

Dalam konteks kolaborasi antara remaja masjid dan santri pondok pesantren, komunikasi dan dialog terbuka menjadi sarana utama dalam membangun sinergi yang harmonis dan berkelanjutan. Komunikasi yang dilakukan secara terbuka memungkinkan kedua pihak untuk saling memahami peran, menyampaikan gagasan, serta menyelesaikan perbedaan pandangan secara konstruktif tanpa menimbulkan konflik yang

³⁷ John M. Bryson, Barbara C. Crosby, dan Melissa Middleton Stone, *"The Design and Implementation of Cross-Sector Collaborations: Propositions from the Literature,"* *Public Administration Review* 66, no. S1 (2006): 44–55.

merugikan. Selain itu, dialog yang terjalin secara intensif juga dapat memperkuat hubungan emosional dan menumbuhkan rasa memiliki terhadap program bersama yang dijalankan. Dengan adanya komunikasi yang sehat dan berlandaskan nilai-nilai ukhuwah Islamiyah, kolaborasi antara remaja masjid dan santri akan lebih efektif dalam mencapai tujuan dakwah serta memberikan dampak positif bagi masyarakat sekitar.

c. Komitmen dan Tujuan Bersama

Kolaborasi yang efektif mensyaratkan adanya komitmen yang kuat dari seluruh pihak yang terlibat. Menurut Rosabeth Moss Kanter (1994), komitmen dalam kolaborasi bukan hanya komitmen terhadap tujuan akhir, tetapi juga komitmen terhadap proses kerja sama itu sendiri. Hal ini mencakup kesediaan untuk meluangkan waktu, tenaga, dan sumber daya dalam

menjalankan tugas yang telah disepakati bersama. Komitmen yang lemah dari salah satu pihak dapat merusak keseimbangan kerja sama dan menurunkan efektivitas kolaborasi secara keseluruhan.

Selain komitmen individual, kejelasan tujuan bersama juga menjadi syarat mutlak dalam kolaborasi. Wood dan Gray (1991) menegaskan bahwa kolaborasi hanya dapat berjalan dengan baik apabila seluruh pihak yang terlibat memiliki pemahaman yang sama mengenai apa yang ingin dicapai. Ketidakjelasan tujuan akan menimbulkan kebingungan dalam pembagian peran, tumpang tindih pekerjaan, dan potensi konflik antar pihak. Oleh karena itu, penetapan tujuan yang jelas dan terukur sejak awal merupakan langkah kritis dalam membangun kolaborasi yang solid.

Dalam konteks kolaborasi antara remaja masjid dan santri pondok pesantren, komitmen dan

tujuan bersama menjadi faktor penting dalam menjaga keberlangsungan serta efektivitas kerja sama yang dijalankan. Komitmen yang kuat tercermin dari kesediaan kedua pihak untuk berpartisipasi aktif, menjalankan tanggung jawab masing-masing, serta tetap konsisten terhadap kesepakatan yang telah dibangun sejak awal. Di sisi lain, adanya tujuan bersama memberikan arah yang jelas dalam pelaksanaan berbagai kegiatan dakwah dan sosial sehingga seluruh program dapat berjalan secara terstruktur dan terkoordinasi. Semakin kuat komitmen dan semakin jelas tujuan yang dimiliki, maka semakin besar peluang terciptanya kolaborasi yang produktif, harmonis, dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.

d. Kepemimpinan Kolaborasi

Faktor kepemimpinan turut memainkan peran penting dalam menentukan arah dan kualitas kolaborasi. Emerson, Nabatchi, dan Balogh (2012)

memperkenalkan konsep kepemimpinan kolaboratif sebagai kemampuan untuk memfasilitasi interaksi antar aktor yang beragam, mengelola perbedaan kepentingan, serta menjaga konsistensi proses kerja sama menuju tujuan bersama. Pemimpin kolaboratif tidak bertindak sebagai pengambil keputusan tunggal, melainkan sebagai fasilitator yang mendorong partisipasi aktif seluruh pihak dalam setiap tahapan proses kolaborasi.³⁸

Dalam konteks organisasi keagamaan seperti remaja masjid dan pondok pesantren, kepemimpinan kolaboratif sangat relevan untuk diterapkan.³⁹ Pemimpin yang mampu menjembatani perbedaan latar belakang,

³⁸ Rosabeth Moss Kanter, "Collaborative Advantage: The Art of Alliance," *Harvard Business Review* 72, no. 4 (1994): 96–108.

³⁹ David L. Wood dan Barbara Gray, "Toward a Comprehensive Theory of Collaboration," *Journal of Applied Behavioral Science* 27, no. 2 (1991): 139–162.

mendorong komunikasi yang inklusif, dan mengelola dinamika kelompok dengan bijak akan sangat menentukan keberlanjutan dan efektivitas program-program kolaborasi yang dijalankan. Kepemimpinan yang baik juga berperan dalam menciptakan iklim saling menghargai dan menghormati di antara anggota kelompok yang terlibat.

4. Kolaborasi Remaja Masjid dan Remaja Pondok Pesantren

Kolaborasi antara santri dan Remaja Islam Masjid (Risma) merupakan bentuk sinergi dakwah yang memiliki peran strategis dalam pembinaan keagamaan remaja dan masyarakat. Santri sebagai representasi pendidikan pesantren memiliki bekal keilmuan dan keteladanan ibadah, sedangkan Risma memiliki kedekatan langsung dengan remaja masjid dan masyarakat sekitar. Perpaduan keduanya menciptakan pola pembinaan yang lebih efektif karena

menggabungkan kekuatan keilmuan, pendekatan emosional, dan jangkauan sosial yang luas.⁴⁰

Dalam praktiknya, santri sering dilibatkan sebagai pemateri kajian, pembimbing pesantren kilat, serta pendamping kegiatan keagamaan yang diselenggarakan oleh Risma. Kehadiran santri memberikan warna baru dalam kegiatan Risma karena santri mampu menyampaikan materi keIslaman dengan pendekatan yang santun, mudah dipahami, dan sesuai dengan karakter remaja.⁴¹ Hal ini membuat kegiatan Risma tidak hanya bersifat seremonial, tetapi juga memiliki muatan edukatif yang kuat dalam pembinaan akidah dan akhlak remaja. Kolaborasi ini juga tampak dalam kegiatan sosial kemasyarakatan, seperti bakti sosial, acara Maulid Nabi, Isra Miraj, dan pendampingan belajar mengaji. Santri berperan sebagai pendamping spiritual, sedangkan Risma

⁴⁰ Hari Nur Azizah And Freddrick Tiagita Putra , Nicky Estu Putu Muchtar, "Pesantren As A Pillar Of Islamic Civilization Development In Indonesia", *Academicus: Journal Of Teaching And Learning*, 1.1 (2022), 9–15.

⁴¹ Nisrin Mu and M Rikza Chamami, "Strategies for Improving the Quality of Santri through Sufi Healing", *Journal of Pesantren and Fiqh Sosial*, 6.1 (2025), 1–14.

bertindak sebagai penggerak dan penghubung dengan masyarakat. Pola kerja sama ini tidak hanya mempererat hubungan antara pesantren dan masjid, tetapi juga menumbuhkan rasa kepedulian sosial di kalangan remaja.⁴²

Melalui kolaborasi tersebut, Risma dan santri secara tidak langsung membangun ketahanan iman remaja dan masyarakat. Pembinaan yang berkelanjutan, pendekatan persuasif, serta kehadiran figur teladan dari kalangan santri menjadi faktor penting dalam mencegah melemahnya akidah remaja. Dengan demikian, kolaborasi santri dan Risma dapat dipahami sebagai bentuk dakwah preventif yang efektif dalam menjaga nilai-nilai keIslaman di tengah Masyarakat.

⁴² As Hishnuddin, "Transformative Islamic Education : The Role of Qur ' Anic Value Internalization in Building Santri ' s Religious Character", *Journal of Educational Management Research*, 04.05 (2025), 1858–70.

E. Kajian Tentang Murtad

1. Pengertian Murtad

Secara etimologis, istilah pemurtadan berasal dari kata dasar *murtad*, yang merupakan serapan dari bahasa Arab ارتداد (*irtidād*) atau ردة (*riddah*), yang berarti “berpaling” atau “kembali” dari sesuatu. Dalam konteks keagamaan Islam, *irtidād* merujuk pada tindakan seseorang yang berpaling atau keluar dari agama Islam setelah sebelumnya memeluknya. Kata ini berasal dari akar kata *radd*, yang artinya “menolak” atau “mengembalikan”. Dengan demikian, pemurtadan secara harfiah berarti tindakan kembali kepada kekafiran atau menolak keimanan setelah sebelumnya menerima Islam sebagai agamanya.⁴³

Adapun definisi murtad secara etimologis dapat disimpulkan bahwa murtad merupakan tindakan

⁴³Abdur Rahman Ibn Smith, "Rekonstruksi Makna Murtad Dan Implikasi Hukumnya", *journal Al-Ahkam*, 22.2 (2012), 177 <<https://doi.org/10.21580/ahkam.2012.22.2.10>>.

meninggalkan agama Islam dan menganut agama lain selain agama Islam. Adapun definisi menurut para ahli.

a. Menurut Abdur Rahman ibn Smith

Murtad termasuk tindakan pidana sebagaimana pendapat ulama mayoritas yang mendasarkan pada QS. al-Baqarah: 217 dan hadis Nabi: “Barangsiapa yang menukar agamanya, maka bunuhlah ia,” memiliki sejumlah kelemahan. Tinjauan al-Qur’an menunjukkan bahwa sanksi atas murtad adalah sanksi ukhrawi; dan bukan sanksi fisik. Sanksi tersebut berupa tidak mendapatkan petunjuk, tidak mendapat ampunan, dan amal dinilai sia-sia. Mereka juga mendapat laknat dari Allah dan para malaikat, sehingga di akhirat mereka dimasukkan kedalam neraka. Tetapi jika bertobat dan mengikutinya dengan amal kebaikan, maka Allah memberi pengampunan.⁴⁴

b. Menurut Sayyid Sabiq

⁴⁴ ibn Smith, Abdur Rahman. "Rekonstruksi Makna Murtad dan Implikasi Hukumnya." *Journal Al-Ahkam* 22.2 (2012): 193. Ibn Smith.

Dalam Fiqh al-Sunnah dalam Skripsi (Balqis) Mengartikan murtad (*riddah*) adalah kembali ke jalan asal. Disini yang dikehendaki dengan murtad adalah kembalinya orang Islam yang berakal dan dewasa ke kekafiran dengan kehendaknya sendiri tanpa ada paksaan dari orang lain. Baik yang kembali itu orang lelaki maupun orang perempuan.⁴⁵

c. Menurut M. Quraish Shihab

dalam jurnal (Kamal) menafsirkan secara tertulis pada ayat-ayat yang berkaitan dengan murtad yaitu kata kafir. Secara gamblang menjelaskan bahwa orang-orang kafir dan kembali kepada kemusyrikan disebut dengan murtad. Jika seseorang telah memilih satu akidah maka ia telah terikat dengan tuntunan dari agama dan berkewajiban untuk melaksanakan perintah-perintah-Nya

⁴⁵ Balqis Binti Khairudin, Kriteria Murtad Seorang Muslim (Analisis Perbandingan Mazhab Hanafi Dan Syafi), *Skripsi, Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Darussalam, Banda Aceh*, 2021.9.

d. Menurut M. Quraish Shihab

Seseorang diperbolehkan untuk berkata “Allah telah memberikan diri ini kebebasan untuk shalat atau tidak, berzina atau nikah”. Sebab, bila ia telah menerima akidah Islam, maka orang tersebut harus melaksanakan apa yang telah diperintahkan. Dengan kata lain, ketika seseorang telah menetapkan dirinya sebagai seorang muslim, maka dirinya telah terikat dengan seluruh ketentuan yang ada, baik itu dari Allah maupun dari Nabi Muhammad Saw.⁴⁶

Berdasarkan beberapa rumusan di atas dapat kita simpulkan murtad adalah kembali atau berpalingnya seorang muslim dari agama Islam menuju kekafiran atau kemusyrikan, baik dengan keyakinan, perkataan, maupun perbuatan, yang dilakukan secara sadar dan tanpa paksaan. Hal ini dipandang sebagai bentuk penolakan terhadap

⁴⁶ Kamal Tsani Muttaqin, "Interpretasi Ayat-Ayat Murtad Dalam Perspektif Tafsir Al- Munir Karya Wahbah Az-Zuhaili", *Skripsi, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta*, 2024.18.

akidah Islam serta pengingkaran terhadap kewajiban yang telah diterima ketika seseorang mengikrarkan diri sebagai muslim.

2. Faktor Penyebab Murtad

a. Lemahnya Akidah dan Pemahaman Agama

Kurangnya pemahaman terhadap ajaran tauhid, rukun iman, serta dasar-dasar syariat menyebabkan seseorang tidak memiliki fondasi keyakinan yang kuat. Akidah yang rapuh membuat individu mudah terpengaruh oleh ideologi, pemikiran, atau ajaran agama lain.

b. Pengaruh Lingkungan dan Pergaulan

Lingkungan sosial yang tidak mendukung nilai-nilai Islam, seperti pergaulan bebas, komunitas sekuler ekstrem, atau kelompok keagamaan lain yang aktif melakukan misi (missionary movement), dapat mempengaruhi keyakinan seseorang secara perlahan.

c. Faktor pernikahan Beda Agama

Seseorang yang menikah dengan pasangan berbeda agama sering kali menghadapi tekanan emosional dan sosial untuk mengikuti keyakinan pasangannya, terutama jika tidak memiliki keteguhan iman.

d. Pengaruh Ideologi dan Pemikiran Modern

Sekularisme, liberalisme agama, relativisme kebenaran, dan ateisme modern dapat menanamkan keraguan terhadap kebenaran agama jika tidak diimbangi dengan pendidikan akidah yang kuat.⁴⁷

Menurut beberapa faktor yang di dapat terdapat banyak sebab mengapa seseorang menjadi murtad di antaranya Menurut Muhammad Robith, ada dua faktor penyebab seseorang melakukan kemurtadan. Pertama adalah faktor dari dalam diri dan faktor dari luar diri seseorang. Faktor dari dalam diri seseorang

⁴⁷ fika Wulansari, "Perspektif Komunitas Masturah Terhadap Makna Kafir Dan Relevansinya Dalam Al-Qur'an (Studi Komunitas Masturah Di Kota Palopo)", *Skripsi, Institut Agama Islam Negeri (Iain) Palopo* 1 (2025), 22.

disebabkan seseorang tidak berusaha untuk menjaga dan meningkatkan keimanan kepada Allah dan Rasulullah dengan baik sehingga ia mudah untuk melakukan kemaksiatan dan melemahkan iman. Iman yang semakin lemah menyebabkan ia mudah untuk meninggalkan ajaran agama, bahkan pindah agama dan tidak khawatir dengan ancaman hukuman Allah. Faktor kedua penyebab murtad berupa pengaruh dari luar diri seseorang, misalnya akibat kurangnya ilmu agama, kemiskinan, pernikahan seorang muslim dengan non-muslim, cinta yang berlebihan terhadap harta benda dan kedudukan, dan lingkungan.⁴⁸

3. Upaya Mencegah Pemurtadan

Pemurtadan di kalangan remaja dan masyarakat akar rumput merupakan persoalan serius yang tidak hanya berkaitan dengan aspek keyakinan, tetapi juga menyentuh dimensi sosial, ekonomi, dan psikologis.

⁴⁸ Moh Saifulloh and others, "Pelatihan Peningkatan Akidah Islam Bagi Muallaf Di Desa Balerejo Kecamatan Panggungrejo Kabupaten Blitar", *SEWAGATI, Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 7.5 (2023), 15.

Lemahnya pemahaman akidah, minimnya pendampingan keagamaan, serta tekanan ekonomi sering kali menjadi celah masuknya upaya-upaya pemurtadan. Oleh karena itu, diperlukan strategi pencegahan yang tidak hanya bersifat normatif, tetapi juga menyentuh kebutuhan nyata masyarakat, terutama remaja sebagai kelompok yang paling rentan terhadap pengaruh lingkungan dan perubahan social.⁴⁹

a. Upaya yang dilakukan Risma

Di sini, Remaja Islam Masjid (Risma) hadir sebagai wadah pembinaan generasi muda yang memiliki peran strategis dalam memperkuat ketahanan akidah remaja. Melalui kegiatan pengajian, pelatihan keIslaman, mentoring, serta pembentukan lingkungan pergaulan Islami, Risma mampu menjadi benteng awal yang menjaga remaja agar tetap berada dalam koridor nilai-nilai Islam. Pendekatan yang

⁴⁹ Nora Maulidia Julia, "Pembinaan Akidah Ahlusunnah Wal Jama'ah Di Dayah Darul Ihsan Abu Hasan Krueng Kale Desa Siem, Darussalam, Aceh Besar", *Skripsi, Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Darussalam, Banda Aceh* 2021, 1 (2021), 30.

digunakan bersifat persuasif, komunikatif, dan sesuai dengan karakter dunia remaja, sehingga pesan-pesan keIslaman dapat diterima dengan lebih efektif dan membumi.⁵⁰

b. Upaya yang di lakukan Santri dan Pondok pesantren

Sementara itu, pondok pesantren berperan sebagai pusat penguatan akidah dan moral umat secara lebih mendalam dan sistematis. Dengan kurikulum keIslaman yang komprehensif, pembinaan akhlak, keteladanan kyai, serta keterlibatan aktif dalam dakwah masyarakat, pesantren tidak hanya mencetak santri yang berilmu, tetapi juga membangun benteng keimanan masyarakat sekitar. Kolaborasi antara Risma dan pesantren menjadi bentuk sinergi yang penting, karena menciptakan lapisan perlindungan akidah dari tingkat remaja hingga masyarakat luas, sehingga upaya pencegahan

⁵⁰ Indah Husnil Chotima And Others, "Meningkatkan Partisipasi Remaja Islam Masjid (Risma) Al- Muttaqin Terhadap Kegiatan Keagamaan Di Dusun Ii Pondok Kubang", *Mestaka: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 3.5 (2024), 589–93 <<https://doi.org/10.58184/Mestaka.V3i5.463>>.

pemurtadan dapat dilakukan secara berkelanjutan dan menyeluruh

